



DOKUMEN 2023



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAAN
(TERTANGGAL 8 MEI 2023)**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG" around the perimeter and "DINAS SOSIAL" in the center. The signature is a cursive script that extends to the right of the stamp.

Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1
1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan ..	2
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja	7
BAB III PENUTUP	9
LAMPIARAN	
1. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah, Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF dan Pelaksana.

1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan

Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS
Indikator: Persentase penanganan PMKS

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIKAJAN	PENJELASAN				
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab.Buleleng
		Meningkatnya	2 Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS		Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab.Buleleng

2.3 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Sosial secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan tahun 2023. Dengan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



J. Putu Karjawan Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eselon II											
1	Menurunnya penduduk miskin	1 Persentase penduduk miskin	%	5,15	Januari	-	1 Program Pemberdayaan Sosial	2.444.755.199	Januari	21.884.307	Kepala Dinas
					Pebruari	-			Pebruari	61.229.291	
					Maret	-			Maret	323.450.934	
					April	-			April	848.123.682	
					Mei	-			Mei	1.049.313.825	
					Juni	-			Juni	1.231.891.468	
					Juli	-			Juli	1.515.865.917	
					Agustus	-			Agustus	1.701.572.058	
					September	-			September	1.890.484.770	
					Oktober	-			Oktober	2.084.932.413	
					Nopember	-			Nopember	2.265.027.556	
					Desember	5,15			Desember	2.444.755.199	
							2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	682.611.738	Januari	20.007.234	
									Pebruari	77.683.991	
									Maret	113.461.225	
									April	133.468.459	
									Mei	185.466.708	
									Juni	220.574.670	
									Juli	309.259.356	
									Agustus	381.702.115	
									September	461.408.829	
									Oktober	537.598.679	
									Nopember	611.584.338	
									Desember	682.611.738	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase penanganan PMKS	%	6,86		Januari	-	1 Program Rehabilitasi Sosial	6.967.995.468	Januari	54.967.863			
						Pebruari	-			Pebruari	100.692.170			
						Maret	-			Maret	219.318.568			
						April	-			April	292.836.548			
						Mei	-			Mei	1.106.070.643			
						Juni	-			Juni	1.964.880.179			
						Juli	-			Juli	2.887.282.139			
						Agustus	-			Agustus	3.687.344.975			
						September	-			September	4.461.291.671			
						Oktober	-			Oktober	5.430.910.436			
						Nopember	-			Nopember	6.205.945.932			
						Desember	6,86			Desember	6.967.995.468			
						2 Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12			Laporan	Januari		1	
		Pebruari	1											
		Maret	1											
		April	1											
		Mei	1											
		Juni	1											
		Juli	1											
		Agustus	1											
		September	1											
		Oktober	1											
		Nopember	1											
		Desember	1											
		3 Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan	Januari	1								
					Pebruari	1								
					Maret	1								
					April	1								
					Mei	1								
					Juni	1								
					Juli	1								
					Agustus	1								
					September	1								
					Oktober	1								
					Nopember	1								
		Desember	1											

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	Januari	-	1	Program Penanganan Bencana	230.164.253	Januari	11.491.332	
						Pebruari	-				Pebruari	29.510.630	
						Maret	-				Maret	68.642.940	
						April	-				April	81.274.775	
						Mei	-				Mei	94.446.085	
						Juni	-				Juni	105.077.920	
						Juli	-				Juli	117.439.230	
						Agustus	-				Agustus	126.930.540	
						September	-				September	192.845.975	
						Oktober	-				Oktober	206.327.285	
						Nopember	-				Nopember	216.472.418	
						Desember	100				Desember	230.164.253	
						4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan				1	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	
Pebruari	-	Pebruari	189.100.739										
Maret	-	Maret	276.811.024										
April	-	April	346.466.868										
Mei	-	Mei	431.863.918										
Juni	-	Juni	506.028.842										
Juli	-	Juli	604.731.222										
Agustus	-	Agustus	721.142.008										
September	-	September	799.036.076										
Oktober	-	Oktober	876.762.634										
Nopember	-	Nopember	1.130.778.233										
Desember	100	Desember	1.235.295.021										

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1 Persentase capaian IKM Dinas Sosial	%	80	Januari	-	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.583.042.846	Januari	557.270.947	
					Pebruari	-			Pebruari	1.045.372.098	
					Maret	-			Maret	1.597.034.117	
					April	-			April	2.340.145.436	
					Mei	-			Mei	2.961.266.754	
					Juni	-			Juni	3.826.480.947	
					Juli	-			Juli	4.544.458.129	
					Agustus	-			Agustus	5.018.387.814	
					September	-			September	5.497.317.499	
					Oktober	-			Oktober	6.065.383.245	
					Nopember	-			Nopember	6.433.244.919	
					Desember	80			Desember	6.583.042.846	
					TOTAL ANGGARAN (RP)						

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196912311991031053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Eselon III																
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1	Nilai AKIP yang baik	Nilai	80	Januari	-	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.763.684	Januari	37.023.426	Sekretaris			
		2	Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan		12	Pebruari				-	Pebruari		47.423.426		
							Maret				-	Maret		58.631.659		
							April				-	April		87.336.844		
							Mei				80	Mei		97.736.844		
							Juni				-	Juni		108.517.485		
							Juli				-	Juli		137.650.262		
							Agustus				-	Agustus		148.050.262		
							September				-	September		158.450.262		
							Oktober				-	Oktober		187.963.684		
							Nopember				-	Nopember		198.363.684		
							Desember				-	Desember		208.763.684		
							3				Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan		12	Januari	1
					Pebruari		1	Pebruari	758.516.502							
					Maret		1	Maret	1.208.717.151							
					April		1	April	1.782.753.487							
					Mei		1	Mei	2.271.291.337							
					Juni		1	Juni	3.058.125.611							
					Juli		1	Juli	3.468.970.163							
					Agustus		1	Agustus	3.871.388.880							
		September	1	September	4.273.807.597											
		Oktober	1	Oktober	4.672.992.100											
		Nopember	1	Nopember	4.963.042.806											
		Desember	1	Desember	5.038.329.765											

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Eselon III												
		4	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
		5	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.103.342	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember	20.542.778 39.453.127 52.633.794 77.704.558 141.720.138 154.589.028 284.212.035 293.592.615 302.973.195 327.042.182 342.722.762 352.103.342	
								2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.024.175	Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember	86.017.165 170.130.373 216.938.580 324.315.431 368.123.636 414.931.841 546.414.704 590.222.909 637.031.114 744.407.765 788.215.970 835.024.175	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Eselon III										
							3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.821.880	Januari	19.113.987
										Pebruari	29.848.670
										Maret	60.112.933
										April	68.035.116
										Mei	82.394.799
										Juni	90.316.982
										Juli	107.210.965
										Agustus	115.133.148
										September	125.055.331
										Oktober	132.977.514
										Nopember	140.899.697
										Desember	148.821.880
TOTAL ANGGARAN (RP)									6.583.042.846,00		6.583.042.846,00

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Eselon III										
1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sosial (PSKS)	1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	80	Januari - Pebruari - Maret - April - Mei - Juni - Juli - Agustus - September - Oktober - Nopember - Desember 80	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2.444.755.199	Januari 21.884.307 Pebruari 61.229.291 Maret 323.450.934 April 848.123.682 Mei 1.049.313.825 Juni 1.231.891.468 Juli 1.515.865.917 Agustus 1.701.572.058 September 1.890.484.770 Oktober 2.084.932.413 Nopember 2.265.027.556 Desember 2.444.755.199	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		2	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan	Januari 1 Pebruari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 September 1 Oktober 1 Nopember 1 Desember 1					

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1 Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	%	100	Januari	-	1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.235.295.021	Januari	112.985.412		
					Pebruari	-			Pebruari	189.100.739		
					Maret	-			Maret	276.811.024		
					April	-			April	346.466.868		
					Mei	-			Mei	431.863.918		
					Juni	-			Juni	506.028.842		
					Juli	-			Juli	604.731.222		
					Agustus	-			Agustus	721.142.008		
					September	-			September	799.036.076		
					Oktober	-			Oktober	876.762.634		
		Nopember	-	Nopember	1.130.778.233							
		Desember	100	Desember	1.235.295.021							
		2 Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
September	1											
Oktober	1											
Nopember	1											
Desember	1											
TOTAL ANGGARAN (RP)							3.680.050.220,00	3.680.050.220,00				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Eselon III													
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	6,86	Januari	-	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.800.404.548	Januari	40.095.139	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
						Pebruari	-				Pebruari	82.219.446	
						Maret	-				Maret	156.783.686	
						April	-				April	224.191.454	
						Mei	-				Mei	1.030.025.549	
						Juni	-				Juni	1.885.235.085	
						Juli	-				Juli	2.746.441.433	
						Agustus	-				Agustus	3.540.814.269	
						September	-				September	4.311.160.965	
						Oktober	-				Oktober	5.270.519.516	
						Nopember	-				Nopember	6.041.955.012	
						Desember	6,86				Desember	6.800.404.548	
		2	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan	12	Januari	1	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	167.590.920	Januari	14.872.724	
						Pebruari	1				Pebruari	18.472.724	
						Maret	1				Maret	62.534.882	
						April	1				April	68.645.094	
						Mei	1				Mei	76.045.094	
						Juni	1				Juni	79.645.094	
						Juli	1				Juli	140.840.706	
						Agustus	1				Agustus	146.530.706	
						September	1				September	150.130.706	
						Oktober	1				Oktober	160.390.920	
						Nopember	1				Nopember	163.990.920	
						Desember	1				Desember	167.590.920	
TOTAL ANGGARAN (RP)								6.967.995.468,00	6.967.995.468,00				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Eselon III											
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	%	100	Januari	-	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	682.611.738	Januari	20.007.234	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
					Pebruari	-				Pebruari	77.683.991	
					Maret	-				Maret	113.461.225	
					April	-				April	133.468.459	
					Mei	-				Mei	185.466.708	
					Juni	-				Juni	220.574.670	
					Juli	-				Juli	309.259.356	
					Agustus	-				Agustus	381.702.115	
					September	-				September	461.408.829	
					Oktober	-				Oktober	537.598.679	
					Nopember	-				Nopember	611.584.338	
					Desember	100				Desember	682.611.738	
		2	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					Nopember	1						
					Desember	1						

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	1	%	100	Januari	-	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	230.164.253	Januari	11.491.332	
Pebruari		-			Pebruari	29.510.630						
Maret		-			Maret	68.642.940						
April		-			April	81.274.775						
Mei		-			Mei	94.446.085						
Juni		-			Juni	105.077.920						
Juli		-			Juli	117.439.230						
Agustus		-			Agustus	126.930.540						
September		-			September	192.845.975						
Oktober		-			Oktober	206.327.285						
Nopember		-			Nopember	216.472.418						
Desember		100			Desember	230.164.253						
2		Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12	Januari	1						
Pebruari					1							
Maret					1							
April					1							
Mei					1							
Juni					1							
Juli					1							
Agustus					1							
September					1							
Oktober					1							
Nopember					1							
Desember					1							
TOTAL ANGGARAN (RP)								912.775.991,00	912.775.991,00			

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.1 (M/b)

NIP. 19601231 199103 1 053